

Pers Rilis

100 Hari Kerja JKW-JK: Menyandera Agenda Trisakti Dalam APBNP 2015

APBN merupakan instrumen ideologis dan jangkar perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan anggaran negara adalah usaha untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi. Akan tetapi, tantangan dalam menyusun APBN yang konstitusional amatlah berat. Yang paling pokok adalah orientasi kebijakan ekonomi nasional secara umum yang terlanjur bersebrangan dengan maksud konstitusi. Akibatnya, kebijakan fiskal dibuat mengikuti format struktur ekonomi yang terlanjur liberal. Ruang manuver dalam menjalankan agenda ekonomi kerakyatan sangat terbatas, hal tersebut dikarenakan kebijakan anggaran negara yang tersandra oleh agenda-agenda kapitalisme-liberalisme.

Terpilihnya Jokowi – JK sebagai presiden dan wakil presiden RI seharusnya dapat membawa arah perubahan dalam kebijakan anggaran negara. Sebagaimana janjinya, perubahan tersebut dilakukan dengan cara menjadikan “Trisakti” sebagai haluan dan garis ideologi dalam pengelolaan pembangunan nasional. Agenda ini menghendaki disusunnya kebijakan anggaran negara yang sesuai dengan semangat trisakti, khususnya pada tahun pertama pembahasan anggaran perubahan, dan catatan-catatan kritis yang ditemukan dalam usulan pemerintah terhadap pembangunan nasional yang dituangkan dalam APBN-P 2015, antara lain;

1. Pendapatan negara direncanakan akan mengalami penurunan sebesar Rp 24,6 triliun dari APBN 2015. Alasan penurunan tersebut direncanakan akan diturunkannya PNBPN sebesar Rp 129,3 triliun (adanya penurunan harga minyak mentah, penurunan lifting migas, dan penurunan bagian laba (dividen) BUMN hingga Rp 9 triliun.
2. Penurunan Pendapatan dari dividen BUMN, tidak mendasar mengingat nilai aset BUMN telah mencapai Rp 4.216 triliun per 31 desember 2013, dengan nilai PMN yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada BUMN sebesar Rp 793 triliun. Sebenarnya BUMN dapat menjadi potensi pendapatan terbesar negara selain pajak yang tidak bisa dipungkiri. Namun jika melihat jumlah dividen yang disetor BUMN ke negara besaran rata-rata hanya mencapai 21,3 % tiap tahunnya selama 2010-2013. Kecilnya setoran laba BUMN tersebut karena sebagian besar laba yang diperoleh cenderung di tahan di masing-masing BUMN. Bahkan per Desember 2013, laba di tahan telah mencapai Rp 509,8 triliun.
3. Perubahan kebijakan belanja terbesar adalah adanya pemotongan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 186,3 triliun (dari alokasi sebesar Rp 344,7 triliun di APBN 2015 menjadi Rp 158,4 triliun. Rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk mengurangi secara bertahap alokasi subsidi energi di dalam APBN sangat disayangkan mengingat tidak transparannya model perhitungan subsidi energi yang dilakukan pemerintah saat ini sehingga menimbulkan potensi “mark-up” atau kelebihan harga. Pemotongan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah juga diasumsikan dapat mengurangi daya saing industri nasional, dan dengan terjadinya peningkatan indeks gini 2001 – 2014 dari 0,32 menjadi 0,43, pengurangan subsidi energi dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan kaya-miskin di tengah rakyat.
4. Selama ini kebijakan pengurangan subsidi BBM tidak diikuti dengan pengurangan alokasi pada belanja pegawai dan belanja barang. Dalam periode 2001 – 2014, pengurangan subsidi BBM yang ditandai oleh kenaikan harga BBM sebesar 465 persen (rata-rata 33 persen per tahun), selain bermuara pada penurunan subsidi BBM terhadap belanja pemerintah pusat dari 26,2 persen menjadi 19,3 persen, ternyata diikuti oleh peningkatan belanja pegawai dan belanja barang pemerintah pusat dari 18,7 persen menjadi 37,6 persen. Dalam periode yang sama, subsidi BBM turun dari 4,1 persen menjadi 2,4 persen PDB atau turun 1,7 persen PDB. Sebaliknya, belanja pegawai dan belanja barang pemerintah pusat meningkat dari 2,9 persen menjadi 4,8 persen PDB atau meningkat 1,9 persen PDB. Relatif terhadap belanja pemerintah pusat, belanja modal 2001 – 2014 justru turun dari 16 persen menjadi 12,6

persen. Dalam rencana APBN Perubahan 2015, ada kenaikan belanja K/L sebesar Rp 132,2 triliun, yang sebelumnya hanya Rp 647,3 triliun dalam APBN 2015 naik menjadi Rp 779,5 triliun.

APBN 2015			647.309,9
APBN Perubahan 2015			132.226,9
No	Uraian Perubahan	Kementerian/Lembaga	Alokasi (Rp miliar)
1	Perubahan Pagu Penggunaan PNPB/BLU	Kemenag, Kemkes, KemenHukum, Kemen ESDM, KemenKel&Per, dan Kemendagri	1.909,2
2	Perubahan sumber pinjaman Luar Negeri	Kemendagri, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenkes,	1.875,9
3	Perubahan Sumber Hibah	Kemenag, kemen PU&Pera,	(440,9)
4	Perubahan SBSN	Kepolisian, LIPI, KemenkoPolHukum	(316,1)
5	Realokasi dari BA BUN - cadangan perlindungan sosial (realokasi BA BUN ke BA Kemensos) - cadangan tunjangan kinerja ke beberapa K/L	A. Belanja Pegawai - Kemenko Bidang perekonomian - MA - BPKP - KemenHukum - Kemenkeu - Kejaksaan - Komnas HAM B. Cadangan Perlindungan Sosial - Kemensos	4.083,4 5.000,0
6	Tambahan Anggaran Prioritas		120.475,6
7	Perubahan Lainnya		(360,1)
RAPBN-P 2015			779.536,9

5. Pada Kebijakan Belanja, ada rencana tambahan alokasi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 20 triliun yang diikuti dengan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 15,1 triliun (dari Rp 127,7 triliun di APBN 2015 menjadi Rp 112,6 triliun). Dalam hal ini semakin mempersempit ruang fiskal bagi Kab/Kota, dimana pembangunan nasional akan dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga yang ditunjuk. Program pusat yang akan dijalankan oleh Kab/kota antara lain Infrastruktur irigasi, pertanian, transportasi (subbidang jalan), sarana perdagangan, Kesehatan (subbidang kesehatan rujukan)
6. Pemerintah akan merencanakan penarikan pinjaman luar negeri dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 49,2 triliun yang terdiri dari penarikan pinjaman proyek sebesar Rp 41,9 triliun dan pinjaman program sebesar Rp 7,3 triliun. Dimana sebagian besar pinjaman luar negeri akan diteruskan ke Kementerian/Lembaga sebesar Rp 34,8 triliun, antara lain di Kemendagri, Kemen PU&Pera, KemenKes, KemenDikBud, kepolisian dan LIPI. Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan komitmen pinjaman siaga sebesar Rp 61 triliun dalam APBN-P 2015, yang telah disiapkan sejak tahun 2012 hingga pertengahan 2015 (belum digunakan fasilitas tersebut). Komitemn pinjaman siaga tersebut berasal dari World bank sebesar Rp 24,4 triliun, ADB sebesar 6,1 triliun, Pemerintahan Jepang (JBIC) sebesar Rp 18,3 triliun, dan Pemerintah Australia sebesar Rp 12,2 triliun.
7. Kebijakan penarikan pinjaman ini sangat disesalkan mengingat per Juli 2014, jumlah

- Pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN) telah mencapai Rp2.608,14 triliun (DJPU, Agustus 2014). Beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang sangat besar. Realisasi pembayaran cicilan dan pokok utang dalam APBN mencapai Rp215.546 triliun (2010), Rp207,872 triliun (2011), Rp240,508 triliun (2012), Rp273,059 triliun (2013), dan Rp368,981 triliun (pagu 2014).[1] Total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pada tahun 2009-2013 berjumlah Rp 1.199,745 triliun. Dalam konteks utang luar negeri, pemerintah mencatat total penarikan ULN hingga desember 2013 telah mencapai USD 202.033,2 miliar, dari total komitmen sebanyak USD 219.960,7 miliar atau 4.736 pinjaman. Dari total penarikan ini, pemerintah telah membayar cicilan pokok sebesar USD 143.938,7 miliar, pembayaran bunga sebesar USD 78.784,9 miliar, pembayaran biaya pinjaman (fee, dll) sebesar USD 2.964,8 miliar. Jika dijumlahkan, total pembayaran cicilan bunga dan pokok utang serta biayanya sudah mencapai USD 225.688,4 miliar. Sementara pada posisi itu, Indonesia masih memiliki outstanding utang sebesar USD 58.094,5 miliar dan sisa utang LN yang belum ditarik sebesar USD 22.700,9. Jika dijumlahkan, total stok ULN pemerintah mencapai USD 80.794,4 miliar.
8. Pada APBN Perubahan (APBN-P) 2015, alokasi PMN kepada BUMN mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari Rp 5.107,3 triliun dalam APBN 2015 menjadi 72.970,4 triliun pada APBN-P 2015. Dari 40 BUMN yang mendapatkan suntikan modal segar dari pemerintah, alokasi PMN untuk pembangunan infrastruktur dan kemaritiman mendapat alokasi yang paling besar. Dan alokasi PMN tertinggi untuk sektor infrastruktur dan kemaritiman diberikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan alokasi sebesar Rp20.356,6 triliun. Sebuah BUMN di bawah kementerian Keuangan yang didirikan atas pinjaman Bank Dunia sebesar US\$100 juta pada tahun 2009. Tambahan PMN kepada PT SMI ini merupakan pengalihan seluruh investasi yang telah sebelumnya dialokasikan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) termasuk yang disalurkan ke PT PLN (persero). Tingginya pemberian ke PT SMI, alasan klasik pemerintah adalah untuk percepatan penyediaan infrastruktur nasional, padahal model kemitraan yang dibangun adalah dengan pihak swasta/atau lembaga keuangan internasional.
 9. Karena PT SMI, melalui anak perusahaannya bernama PT Indonesia Infrastructure Finance ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pihak swasta, berarti dari total PMN infrastruktur sebesar Rp50.713,90 triliun dalam APBNP 2015 tidak sepenuhnya dilakukan oleh BUMN. Sekurang-kurangnya uang rakyat sebesar Rp20.356,6 triliun diperuntukan secara langsung untuk perusahaan swasta yang pengelolaan infrastrukturnya dilakukan secara komersial. Oleh karenanya, dapat dipastikan bahwa pemberian PMN infrastruktur patut diwaspadai sebagai mekanisme komersialisasi infrastruktur di Indonesia. Selain itu, dengan terbatasnya waktu pembahasan APBN Perubahan 2015 di DPR, sulit mengharapkan bahwa dana PMN ke BUMN ini akan menghasilkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang baik yang melibatkan partisipasi rakyat dan diperuntukan bagi hajar hidup orang banyak di Indonesia. Dalam kondisi ini, kita patut khawatir bahwa penambahan PMN dapat kembali menjadi bancakan para elit politik.

Rekomendasi

1. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara dengan cara melakukan koreksi terhadap kebijakan perpajakan dan non pajak. Kebijakan perpajakan haruslah berorientasi progresif yang dapat menasar lapisan atas kelompok masyarakat, perusahaan-perusahaan besar dan korporasi multinasional. Dalam peningkatan penerimaan non-pajak dilakukan dengan cara memperbaiki tata kelola SDA untuk menghindari kerugian negara dari praktek bisnis dan adanya ketidakadilan kontrak-kontrak kerjasama berupa hak pengelolaan bagi hasil, royalti/penjualan SDA dan optimalisasi pengelolaan BUMN.
2. Problem mendasar BUMN mengenai kecilnya laba yang di setor ke negara, tidak sebanding dengan PMN yang dikeluarkan dan laba yang ditahan oleh BUMN. Maka diperlukan adanya

perlindungan regulasi yang harus menyatakan dengan tegas tentang prosentase minimal laba di tahan dan laba yang harus ditahan termasuk mengenai jumlah PMN ataupun penerima PMN. Kemudian membangun tata kelola dalam pengelolaan BUMN, terutama pada pemanfaatan PMN, dan laba yang di tahan untuk alasan ekspansi pengembangan bisnis, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

3. Pemerintah harus mengubah penyusunan format APBN defisit yang menjadi legitimasi penarikan utang-utang baru dan mendorong optimalisasi alternatif pendanaan pembangunan di luar utang untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional. Karena peningkatan utang pemerintah telah menghasilkan tiga resiko yang serius: *Pertama*, Menyempitnya ruang fiskal karena besarnya pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN. *Kedua*, intervensi politik-ekonomi pihak kreditor dalam menentukan agenda-agenda dan kebijakan pembangunan nasional. *Ketiga*, kerentanan ekonomi nasional yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar dan goncangan ekononomi di tingkat eksternal.
4. Pemerintah harus mengupayakan suatu langkah diplomasi ekonomi untuk memanfaatkan peluang dan fasilitas penghapusan utang-utang Indonesia, terutama yang termasuk dalam kategori utang najis dan tidak sah (*Odious Debt/Illegitimate Debt*) dengan pihak kreditor. Dua alasan yang dapat digunakan sebagai titik tolak untuk meminta penghapusan utang dengan menggunakan konsep utang najis. (1) buruknya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang luar negeri dalam era Soeharto hingga saat ini, dan (2) para kreditor wajib bertanggungjawab atas kelalaian mereka dalam memberikan utang. Hal ini terutama karena cukup kuatnya dugaan keterlibatan para kreditor pada berbagai skandal korupsi proyek-proyek utang itu.
5. Untuk menjalankan cita-cita bahwa daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik, maka pemerintah harus Memberikan ruang fiskal yang Lebih besar kepada Daerah (Kabupaten/Kota) dalam menjalankan pembangunan nasional dengan meningkatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Daerah dan mengurangi Dana Alokasi Khusus yang dikerjakan oleh pemerintah pusat.

Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat

Cp

Yenny Sucipto, Sekjen FITRA 08133311146

Dani Setiawan, Koord. KAU

Ah Maftuhan, Peneliti Prakarsa

Waidl, Sekjen KAI